

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah pada dasarnya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing daerah. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom diharapkan agar setiap daerah mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang setiap daerah dalam menghadapi tantangan persaingan global. Persaingan global yang saat ini muncul merupakan dampak dari adanya globalisasi sebagai tatanan dunia baru. Secara umum pengertian globalisasi adalah suatu proses dimana antar individu, antar kelompok dan antar negara saling berinteraksi, bergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Globalisasi membawa tantangan baru bagi proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Dari segi ekonomi dampak yang muncul beraneka ragam, adanya intervensi ekonomi pada suatu negara memungkinkan untuk menimbulkan ancaman bagi ekonomi domestik. Dominasi industri-industri perdagangan asing yang memiliki kekuatan pasar semakin gencar melakukan ekspansi ke suatu

wilayah mengingat kebebasan untuk berusaha dimana saja dan kapan saja. Mengingat kondisi persaingan antar pelaku ekonomi semakin tajam, kondisi persaingan tersebut mewajibkan tiap pelaku ekonomi untuk menerapkan strategi bersaing secara tepat, efektif dan efisien. Jika suatu wilayah belum siap baik secara tatanan pemerintahan, sumber daya manusia yang dimiliki serta struktur ekonomi yang kuat dalam menghadapi ekspansi oleh industri luar negeri tersebut, bukan tidak mungkin industri atau pengusaha lokal akan tersisih akibat kalah dalam menghadapi persaingan tersebut.

Untuk menyikapi berbagai permasalahan tersebut, perlu adanya peningkatan dari segi pelayanan kepada masyarakat agar semakin efektif dan efisien. Mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah sehingga diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Seiring dengan dinamika otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari 10 tahun di Indonesia, muncul berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengatur daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah didorong untuk terus berinovasi agar daerahnya tumbuh dan berkembang secara mandiri.

Dari segi ekonomi setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali serta memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki untuk membangun perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi di tingkat daerah telah memberi peluang bagi berkembangnya berbagai macam usaha perdagangan di bidang pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan

seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan daya beli masyarakat, peningkatan produksi barang dan jasa serta peningkatan permintaan masyarakat terhadap ketersediaan barang dan jasa baik dari segi kualitas, kuantitas serta pelayanan yang lebih cepat.

Salah satu sektor perdagangan yang berkembang pesat di Indonesia adalah industri ritel dalam konsep yang lebih modern. Saat ini peritel-peritel asing dan pengelola pasar modern sangat aktif untuk melakukan ekspansi baik dalam bentuk *Hypermarket*, *Supermarket* dan *Minimarket*. Supermarket pertama di Indonesia dibuka pada 1970-an, dan jumlahnya meningkat dengan pesat antara 1977 dan 1992 dengan rata-rata pertumbuhan 85% setiap tahunnya. Pengelola *supermarket* mulai masuk pasar dalam negeri pada awal pemberlakuan liberalisasi sektor ritel pada tahun 1998. Kemunculan *Hypermarket* pertama kali pada 1998, dengan pembukaan pusat belanja Carrefour dan Continent (yang kemudian diambil alih oleh Carrefour) di Jakarta. Dari 1998 hingga 2003, *hypermarket* bertumbuh rata-rata 27% per tahun, dari 8 menjadi 49 toko. Semenjak tahun 2003 sekitar 200 *supermarket* dan *hypermarket* merupakan milik dari 10 pemilik ritel terbesar<sup>1</sup>. Pertumbuhan supermarket dalam hal pangsa pasar juga terus mengalami peningkatan. Laporan World Bank pada tahun 2007 menunjukkan bahwa pada 1999 pasar modern hanya meliputi 11% dari total pangsa pasar bahan pangan. Menjelang 2004, jumlah tersebut meningkat tiga kali lipat menjadi 30%. Terkait dengan tingkat penjualan, studi tersebut menemukan bahwa jumlah penjualan di *supermarket* bertumbuh rata-rata 15%, sementara penjualan di ritel tradisional

---

<sup>1</sup> Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia, SMERU 2007

menurun 2% per tahun. Hal yang sama juga dinyatakan menurut laporan AC Nielsen Asia Pacific Retail and Shopper Trend 2005, kecenderungan publik untuk berbelanja di pasar-pasar tradisional telah mengalami penurunan rata-rata 2% per tahun<sup>2</sup>. Industri ritel modern dianggap sebagai industri yang strategis dalam konstribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Dalam konteks global, potensi ritel Indonesia tergolong cukup besar. Industri ritel memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap pembentukan *Gross Domestic Product* (GDP) setelah industri pengolahan<sup>3</sup>.

Selama periode tahun 2007-2011 jumlah gerai ritel di Indonesia mengalami pertumbuhan hingga 17,57% per tahun. Pada tahun 2007 tercatat 10.365 buah dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 18.152 buah yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia<sup>4</sup>. Pertumbuhan ritel modern tersebut diikuti dengan perubahan pola masyarakat dalam berbelanja, jika sebelumnya masyarakat berbelanja di ritel tradisional mulai berubah dengan berbelanja di ritel modern terlebih lagi dengan berbagai macam fasilitas serta kemudahan yang diberikan oleh ritel modern. Berbelanja telah dianggap sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh fungsi rekreasi. Semua faktor tersebut membuat penjualan di ritel modern kian meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh AC Nielsen, 93% konsumen Indonesia menganggap bahwa berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan merupakan salah satu bentuk rekreasi. Pergeseran tersebut

---

<sup>2</sup> Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia, SMERU 2007

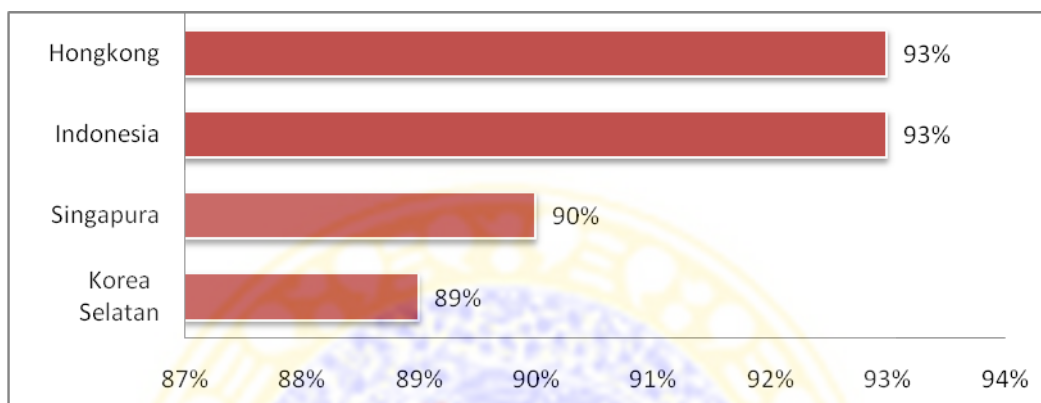
<sup>3</sup> Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2007

<sup>4</sup>“Perkembangan Baru Bisnis Ritel Modern di Indonesia”, diakses dari

<http://indonesianconsume.blogspot.com/2013/02/perkembangan-baru-bisnis-ritel-modern.html?m=0>, diakses 10 Agustus 2014

menjadi faktor begitu cepatnya pertumbuhan toko-toko modern di sebagian besar wilayah perkotaan di Indonesia<sup>5</sup>.

**Grafik I.1**  
**Persepsi Masyarakat Dalam Berbelanja**



Sumber: Ritel Indonesia, AC Nielsen 2009

Saat ini hampir kita jumpai outlet ritel modern di setiap kota di Indonesia. Pertumbuhan tersebut dianggap telah menimbulkan berbagai dampak baik positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain masyarakat dapat lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan mereka, tersedianya barang dan jasa, jarak yang dekat serta tingkat kenyamanan berbelanja lebih tinggi. Menjamurnya keberadaan bisnis ritel modern di daerah dinilai mampu mendorong pertumbuhan PDRB dengan peningkatan dari sub sektor perdagangan di suatu wilayah. Sementara dampak negatif yang muncul dari menjamurnya ritel modern di setiap daerah diklaim oleh beberapa kelompok bahwa pasar tradisional merupakan korban nyata persaingan tajam tersebut yang berdampak pada berkurangnya pelanggan pasar tradisional akibat membanjirnya produk-produk bermutu dengan harga murah dan lingkungan perbelanjaan yang lebih nyaman

<sup>5</sup> Positioning Paper Ritel KPPU 2008 Jakarta

yang disediakan ritel modern. Produk-produk yang diperdagangkan oleh para pedagang pasar tradisional juga tersedia di ritel modern. Keberadaan ritel modern dianggap sebagai penyebab dari kelesuan kegiatan dagang di pasar tradisional. Berbagai kelebihan serta strategi yang dimiliki oleh ritel-ritel modern seperti menjual lebih banyak produk yang lebih berkualitas dengan harga yang relatif lebih murah, informasi daftar harga setiap barang tersedia dan dengan mudah diakses oleh publik, ritel modern menyediakan lingkungan berbelanja yang lebih nyaman dan bersih, jam buka yang lebih panjang, menawarkan aneka pilihan pembayaran seperti kartu kredit, kartu debt dsb, serta produk yang dijual di ritel modern berupa bahan pangan telah melalui pengawasan mutu. Sedangkan strategi yang dilakukan oleh ritel-ritel modern antara lain, strategi pemangsaan melalui penetapan harga untuk menyaingi pelaku bisnis lainnya, diskriminasi harga antar waktu seperti memberikan diskon pada akhir pekan atau jam-jam tertentu, melakukan survey pada pasar tradisional untuk mendapatkan perkiraan tingkat harga pasar sehingga terjadi persaingan harga, praktik subsidi silang yang dilakukan apabila ritel modern mengalami kerugian atas sejumlah barang dagangan dalam rangka memenangkan persaingan. Di bawah ini akan dijelaskan definisi dari berbagai format ritel modern serta metode penjualan yang diterapkan<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Pandin, Marina RL. *The Potrait of Retail Business in Indonesia: Modern Market*. 2009.

**Tabel I.1**  
**Definisi Berbagai Format Ritel Modern**

<b>Format Ritel Modern</b>	<b>Definisi</b>	<b>Metode Penjualan</b>
Pasar Modern	Tempat berbelanja makanan dan perlengkapan rumah tangga termasuk sembako	Eceran langsung ke end consumer, swalayan, tanpa tawar menawar
Dept. Store	Tempat belanja berbagai jenis pakaian yang disuasn dalam counter	Eceran, biasanya dibantu oleh sales attendant, tanpa tawar menawar
Speciality Store	Tempat yang menjual jenis produk tertentu saja seperti elektronik, bahan bangunan	Eceran langsung ke konsumen akhir, dengan metode supermarket, tanpa tawar menawar
Mall/Supermall/Plaza	Tempat belanja, rekreasi, makan, dll yang terdiri dari outlet berukuran kecil	Eceran langsung ke konsumen akhir, metode pelayanan campuran antara supermarket dengan

		dept. Store
Trade Center	Pusat belanja makanan, pakaian, perlengkapan rumah tangga dan keperluan sehari-hari baik oleh ritel maupun grosir ditambah keberadaan fitus penyokong seperti restoran	Eceran/grosir, biasanya dibantu sales attendant, bisa tawar menawar

Berbeda dengan pasar tradisional yang notabene lembaga sosial ekonomi yang lahir dari keaslian sistem sosial ekonomi Indonesia sebagai wujud ekonomi kerakyatan, selain itu pasar tradisional mempunyai nilai historis bagi setiap daerah. Pasar merupakan tempat terjadinya kegiatan ekonomi oleh sebagian besar masyarakat. Di dalam pasar interaksi yang sering terjadi adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Dalam pasar tradisional terdapat berbagai macam jenis pekerjaan, tidak hanya terdapat antara penjual dan pembeli, seperti pedagang sayur keliling, tukang becak, tukang ojek, jasa angkut barang, salon, dsb. Dari sisi komoditas yang dijual di pasar, sebagian pasar tradisional menjual sayuran segar, buah, bahan makanan dan minuman. Sedangkan dari segi permodalan, para pedagang menggunakan modal mereka sendiri dalam menjalankan usaha.

Dalam perkembangannya, kondisi pasar tradisional saat ini ditengarai mulai tersisih oleh keberadaan pasar-pasar modern. Kehadiran tempat-tempat



perbelanjaan modern menimbulkan dianggap telah mengurangi jumlah pelanggan pasar tradisional serta menimbulkan kekhawatiran bagi beberapa pihak akan nasib pasar tradisional dengan skala kecil dan menengah di wilayah perkotaan. Kehadiran para pelaku usaha ritel modern bagi konsumen Indonesia di satu sisi memang sangat menggembirakan. Konsumen dimanjakan dengan berbagai hal positif terkait dengan kenyamanan saat berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yang semakin beragam, kualitas produk yang terus meningkat dan tentu saja harga produk yang menjadi lebih murah karena hadirnya persaingan. Kendati demikian, pertumbuhan ritel modern dianggap telah mendatangkan persoalan tersendiri berupa tersingkirnya usaha ritel tradisional Indonesia yang menjadi tempat menggantungkan hidup bangsa Indonesia dalam jumlah yang tidak sedikit. Kemampuan bersaing mereka yang sangat rendah karena kemampuan kapital yang sangat terbatas, dengan manajemen yang sederhana serta perlindungan dan upaya pemberdayaan yang sangat minim telah menkadikan mereka korban dari proses liberalisasi ekonomi sektor ritel<sup>7</sup>. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah manakala pasar tradisional yang telah berpuluh tahun menjadi penghubung perekonomian perdesaan dengan perkotaan akan hilang dan akan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan. Sementara, pasar dianggap memegang peran yang cukup penting dalam perekonomian, mengingat bahwa sebagian besar masyarakat masih mengandalkan perdagangan melalui pasar tradisional.

---

7 Positioning Paper Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Perlu adanya intervensi dari Pemerintah Kota/Kabupaten untuk melindungi keberadaan pasar tradisional, mengingat pertumbuhan toko modern yang sulit untuk dihindari. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa pembuatan kebijakan yang diharapkan mampu melindungi keberadaan pasar tradisional. Sesuai dengan tipologi kebijakan menurut Ripley dan Franklin *protective regulatory policy*, yakni kebijakan dan program yang didesain untuk membatasi aktifitas-aktifitas sektor privat yang bisa membahayakan atau merugikan sebagian masyarakat yang lain. Harapan dari tujuan kebijakan yang akan dicapai nantinya antara lain pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan, memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern; pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen<sup>8</sup>. Pemerintah daerah harus tanggap untuk mengatasi permasalahan tersebut serta diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi pasar tradisional. Kebijakan yang dibuat haruslah bersifat memberikan solusi kepada pasar-pasar tradisional karena pasar tradisional merupakan salah satu pilar ekonomi yang cukup potensial untuk meningkatkan perekonomian.

---

<sup>8</sup> Positioning Paper Ritel Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2008. Jakarta

Kota Kediri yang tergolong salah satu kota menengah di Jawa Timur dengan luas wilayah kurang lebih 63.404 km<sup>2</sup> serta kepadatan penduduk sebesar 4.962 jiwa per kilometer persegi, selain itu posisi Kota Kediri yang terletak pada jalur transportasi regional yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Tulungagung, Nganjuk dan Malang. Wilayah Kota Kediri terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kota, Pesantren dan Mojoroto dengan 46 kelurahan.

Sebagai kota yang menduduki peringkat pertama sebagai *Indonesia most recommended cities for business* dari survey yang dilakukan oleh majalah *SWA* terhadap 90 pengusaha yang terdiri dari 30 pengusaha kecil, 30 pengusaha menengah, dan 30 pengusaha besar<sup>9</sup> serta menduduki peringkat ketiga dalam meraih investasi terbanyak dari seluruh kota dan kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2011<sup>10</sup>. Kota Kediri juga tidak bisa mengelak dari adanya persaingan antar pelaku bisnis ritel modern, saat ini telah berdiri beberapa *mall* serta puluhan ritel modern yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Kediri. Sementara pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri sebanyak sembilan unit yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Kediri yakni Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren. Saat ini pengelolaan pasar tradisional diserahkan kepada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Joyoboyo. Berdasarkan data PD Pasar Joyoboyo total kios di sembilan pasar di Kota Kediri sekitar 1300 unit. Dari jumlah tersebut diperkirakan sepuluh persennya ditengarai mangkrak dan tidak berfungsi sebagai tempat berjualan, sebagian dari kios yang mangkrak tersebut beralih fungsi menjadi tempat tinggal para pedagang. Peralihan fungsi kios tersebut ditengarai

<sup>9</sup> Diakses dari <http://manuverbisnis.wordpress.com/2010/08/2006/menyimak-kota-pro-bisnis/>

<sup>10</sup> Diakses dari <http://wartaekonomi.co.id/berita5140/kota-surabaya-raih-peringkat-pertama-investasi.html>

akibat lesunya perdagangan di pasar tradisional. Sehingga membuat para pedagang lebih memilih untuk berjualan di luar area pasar.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pasar, Luas Pasar dan Jumlah Pedagang yang Dikelola oleh**  
**Pemerintah Kota Kediri Tahun 2009-2012**

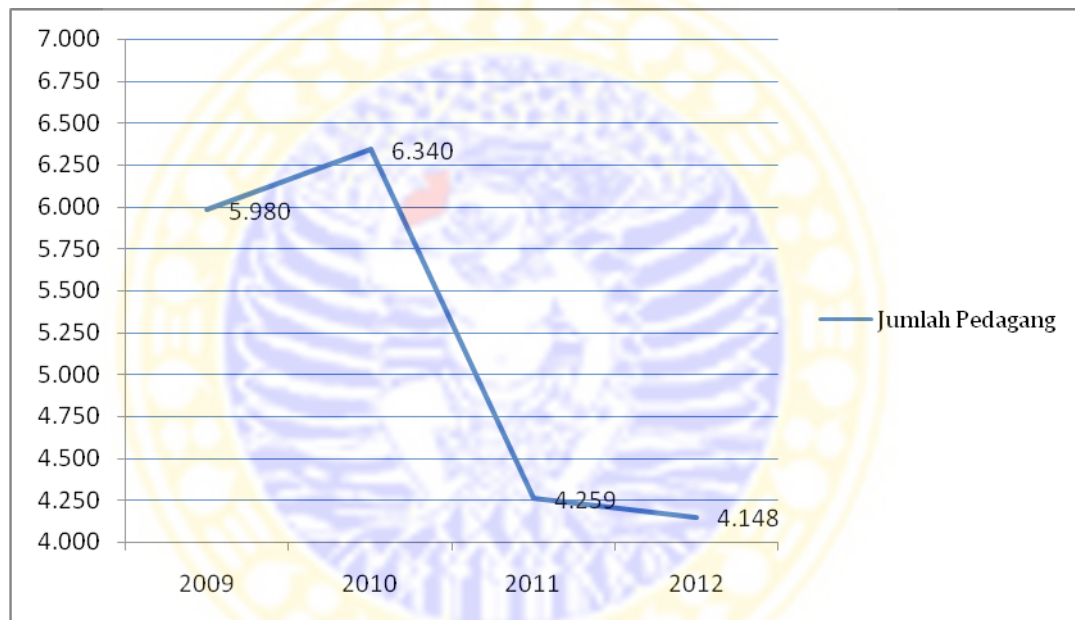
No	Kecamatan	Jumlah Pasar	Luas Pasar (m <sup>2</sup> )	Jumlah Pedagang				Prosentase
				2009	2010	2011	2012	
1	Mojoaroto	4	17.334	1.255	1.341	1.054	1.049	28,9%
2	Kota	4	99.547	3.285	3.495	2.803	2.709	30,6%
3	Pesantren	1	7.532	1.440	1.504	402	390	20,5%
<b>Jumlah</b>		9	12.413	5.980	6.340	4.259	4.148	20%

Sumber: PD Pasar Kota Kediri

Di Kecamatan Kota terdapat 4 pasar tradisional dengan luas keseluruhan pasar mencapai 99.547 m<sup>2</sup>. Kecamatan Mojoaroto memiliki 4 pasar tradisional dengan luas pasar keseluruhan mencapai 17.334 m<sup>2</sup>. Sedangkan di Kecamatan Pesantren terdiri dari 1 pasar tradisional dengan luas pasar 7.532 m<sup>2</sup>. Dari data tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah pedagang dalam kurun waktu 4 tahun meskipun terjadi pertambahan jumlah pedagang pada tahun 2009-2010 dari keseluruhan total pedagang yang berada pada pasar tradisional di Kota Kediri. Kemudian terjadi penurunan drastis terletak pada tahun 2010-2011 dimana pada

tahun 2010 tercatat total pedagang di pasar tradisional sebanyak 6.340 sedangkan pada tahun 2011 turun menjadi 4.259 pedagang atau telah terjadi penurunan jumlah pedagang sebanyak 2.081 pedagang. Gambaran mengenai jumlah pedagang di pasar tradisional dapat dilihat dari grafik berikut.

**Grafik I.2**  
**Pekembangan Jumlah Pedagang Pasar Tradisional di Kota Kediri Periode 2009-2012**



Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Brian Sofia Rizky menunjukkan adanya dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan satu mall di Kota Kediri yang berakibat penurunan omzet para pedagang pasar tradisional serta mengancam keberlangsungan usaha pedagang pasar tradisional di Kota Kediri<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Brian Sofia Riski. 2012. *Pengaruh Pembangunan Kediri Mall Terhadap Kelangsungan Pedagang Pasar Tradisional Setono Betek di Kota Kediri*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

**Tabel 1.3**  
**Omzet Penjualan Pedagang Pasar Tradisional Setonobetek Kota Kediri**  
**Sebelum dan Sesudah Adanya Kediri Mall Tahun 2012**

No	Jenis Dagangan	Omzet Penjualan		Penurunan Omzet	Prosentase
		Sebelum	Sesudah		
1	Konveksi	49450000	21900000	27550000	56%
2	Buah-buahan	9200000	8270000	930000	10%
3	Sandal, sepatu	6750000	2900000	3850000	57%
4	Aksesori	2450000	1350000	1100000	45%

*Sumber* : Analisis Data Primer Tahun 2012

Dari hasil analisis data tersebut ditengarai telah terjadi penurunan omzet pedagang di pasar Setono Betek setelah berdirinya Kediri Mall yang sebelumnya sebesar Rp. 67.850.000 kemudian mengalami penurunan menjadi Rp. 33.430.000 dengan kata lain, telah terjadi penurunan omzet para pedagang di pasar Setonobetek sebesar 49,27% selama tiga tahun. Penurunan omzet terbesar dialami oleh para pedagang konveksi serta sandal dan sepatu dengan prosentase penurunan omzet mencapai lebih dari 50% dari sebelumnya. Dari data tersebut menunjukkan bahwa berdirinya Kediri Mall memberikan pengaruh yang signifikan terhadap omzet penjualan para pedagang pasar tradisional Setonobetek di Kota Kediri.

Pasar Setonobetek merupakan pasar terbesar di Kota Kediri yang saat ini kondisinya bisa dibilang tidak layak untuk dijadikan tempat jual beli. Pasar setonobetek saat ini terlihat kumuh, timbul bau anyir, sistem saluran air yang tidak lancar, pengap. Hal ini tentu saja sangat disayangkan, mengingat pasar tradisional merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat menengah kebawah serta merupakan asset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri harus memberikan perhatian terhadap permasalahan tersebut, mengingat pasar tradisional merupakan salah satu penyumbang pendapatan bagi daerah.

Direktur utama PD. Pasar Joyoboyo menduga kondisi pasar tradisional di Kota Kediri saat ini sudah semakin terpuruk. Hal itu disebabkan karena semakin berkembangnya jumlah pasar modern yang rata-rata sifatnya waralaba. Pihaknya prihatin dengan kondisi pasar tradisional yang kemungkinan besar akan berimbas dari mudahnya pemberian ijin pendirian usaha waralaba di Kota Kediri, hal tersebut tentunya akan berdampak besar dengan menurunnya omzet pendapatan para pedagang. Kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja ditudingnya menjadi penyebab semakin tersisihnya minat konsumen berbelanja di pasar tradisional<sup>12</sup>. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) pada tahun 2008 bahwa yang paling mempengaruhi keberadaan pasar tradisional ialah *hypermarket* dan *supermarket*. Hal tersebut dikarenakan *hypermarket* atau *supermarket* menjual produk yang serupa yakni produk jenis sembako, ikan, sayur, daging, pakaian dan kebutuhan-kebutuhan

---

<sup>12</sup> Diakses dari <http://fadjar29.blogspot.com/2011/03/pasar-tradisional-di-kediri-makin.html>

rumah tanggah lainnya. Sedangkan keberadaan *minimarket* berjejaring tidak begitu memberikan dampak yang begitu besar terhadap pasar tradisional. Keberadaan *minimarket* berjejaring tersebut lebih berdampak signifikan terhadap toko-toko kelontong di sekitar *minimarket*.

Saat ini hampir di setiap kelurahan berdiri ritel modern seperti alfamart dan indomaret. Keberadaan *minimarket* tersebut dianggap telah mematikan perekonomian masyarakat kecil yang mengais rejeki dari toko kelontong<sup>13</sup>. Tentu saja hal ini membuat resah para pedagang-pedagang kecil, mengingat kalahnya para pedagang-pedagang kecil dari segi permodalan dan manajemen dengan ritel-ritel modern yang ada. Keberadaan ritel modern menyebabkan pendapatan serta keuntungan yang diperoleh peritel tradisional menurun drastis<sup>14</sup>.

Kediri - Pemerintah Kota Kediri Jawa Timur menampik mempermudah izin pendirian usaha waralaba yang membuat semakin menjamurnya toko modern di kota tersebut. Sekretaris Kota Kediri Agus Wahyudi, Senin mengemukakan pemerintah tidak bermaksud untuk mempermudah pendirian usaha waralaba tersebut. Namun, sampai saat ini belum ada aturan yang jelas tentang pembatasan usaha tersebut. “Belum ada aturan untuk melarang atau membatasi usaha tersebut. Namun kami dalam waktu dekat akan melakukan pembahasan untuk pendiriannya,” ucapnya. Kepala Kantor Perizinan Terpadu Agus Suharyanto, mengemukakan sampai saat ini ada sekitar 25 usaha waralaba, dari Indomaret dan Alfamart di Kota Kediri. Ia juga mengakui, jarak pendirian usaha waralaba tersebut dengan pasar tradisional cukup dekat, hanya sekitar 300 meter. Harusnya, jarak itu bisa lebih jauh lagi, mengingat barang-barang yang dijual di waralaba itu juga sama dengan yang dijual para pedagang, di antaranya kebutuha bahan pokok. Ia mengatakan, jumlah waralaba sampai 25 di Kediri itu memang cukup besar. Usaha itu belum ditambah dengan banyaknya pusat perbelanjaan modern lainnya, seperti Matahari, Ramayana, Dhoho Plaza, Sri Ratu yang juga menjual barang-barag yang sama, baik pokok maupun pakaian. “Kalau tahun ini belum ada pengajuan izin lagi, kami segera buat aturan untuk pembatasan,” ujarnya.

(diakses dari <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/88914/pemkot-tampik-permudah-izin-pendirian-waralaba>)

<sup>13</sup> Abdullah Abu Bakar (Walikota Kediri), diakses dari <http://beritajatim.com>

<sup>14</sup> Penelitian SMERU Tahun 2007 tentang Dampak Supermarket Terhadap Pasar Tradisional



Mengacu pada permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Kediri berinisiatif membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar dan tempat berjualan pedagang, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat. Pengelolaan pasar bertujuan untuk menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah. Kebijakan seperti ini dianggap penting untuk diberlakukan di setiap daerah mengingat saat ini keberadaan pasar tradisional kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota/Kabupaten. Keberadaan pasar tradisional dianggap sebagai pilar perekonomian daerah justru kian tersisih oleh berdirinya toko-toko modern yang hampir tersebar di kota seluruh Indonesia.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti ingin menjelaskan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern serta memberikan penjelasan mengenai dampak setelah adanya peraturan daerah

tersebut terhadap perkembangan pasar dan pedagang ritel tradisional di Kota Kediri.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang harus dijawab dalam setiap penelitian. Mengingat luasnya cakupan masalah yang akan diteliti terkait dengan evaluasi perda nomor 5 tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, peneliti membatasi penelitian hanya pada sektor ritel di Kota Kediri, rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak perda nomor 5 tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Kediri?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian mengenai analisis perda nomor 5 tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, antara lain:

1. Memberi penjelasan mengenai dampak perda nomor 5 tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Kediri

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangsih kepada Pemerintah Daerah Kota Kediri sertai Ilmu Administrasi Negara.

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Secara akademis penelitian ini dapat memperkaya khasanah Ilmu Administrasi Negara khususnya studi mengenai kebijakan publik. Studi tentang kebijakan publik menjadi salah satu kajian yang mendapat perhatian serius dalam konteks Ilmu Administrasi Negara, mengingat saat ini kebijakan-kebijakan publik yang dibuat didapati belum mampu menyelesaikan permasalahan yang begitu kompleks, sehingga perlu perhatian serius dari para akademisi dalam bidang studi kebijakan publik untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian mengenai Studi Analisis Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasat Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Di Kota Kediri diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta memberi masukan kepada Pemerintah Kota Kediri khususnya dalam hal yang berhubungan dengan penataan ritel modern serta pembinaan bagi ritel tradisional di Kota Kediri. Selain itu, penelitian kali ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi daerah yang bukan tidak mungkin akan menjadi sasaran ekspansi oleh pengusaha ritel modern dan menghadapi permasalahan yang sama seperti Kota Kediri terkait dengan keberadaan ritel-ritel modern yang mengancam para pengusaha ritel dengan modal kecil.

## Review Studi Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian SMERU tentang “Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia”, yang membahas tentang dampak dari pertumbuhan ritel modern terhadap para pedagang tradisional di Indonesia
2. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam Positioning Ritel KPPU membahas mengenai adanya dampak yang ditimbulkan oleh ritel modern yang berpotensi sangat besar menggerus ritel kecil atau tradisional.
3. Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembangunan Kediri Mall Terhadap Kelangsungan Pedagang Pasar Tradisional Setono Betek Di Kota Kediri”, oleh Brian Sofia Rizki S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya.

Pada penelitian sebelumnya diulas mengenai dampak yang ditimbulkan dari menjamurnya ritel-ritel modern terhadap pasar tradisional di beberapa kota besar di Indonesia. Dalam beberapa penelitian tersebut dibahas mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab berkurangnya pengunjung pasar tradisional serta menganalisis beberapa strategi yang dimiliki oleh pengelola ritel modern yang menyebabkan dampak negatif terhadap pasar tradisional. Selain hal tersebut, penelitian sebelumnya juga membahas mengenai strategi dari beberapa pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi dampak negatif yang dialami pasar tradisional akibat dari menjamurnya ritel modern.

Dalam penelitian kali ini, peneliti mencoba untuk membandingkan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh menjamurnya ritel-ritel modern terhadap pasar dan pedagang ritel tradisional di wilayah Kota Kediri. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai program-program apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri sebagai upaya melakukan perlindungan terhadap pasar dan pedagang ritel tradisional.

## **I.5 Tinjauan Pustaka**

Seiring dengan perkembangan zaman Ilmu Administrasi Negara juga dituntut untuk memberikan pemikiran terkait dengan permasalahan yang semakin kompleks. Dari segi teori tentang kebijakan, pada saat ini pentingnya merumuskan suatu kebijakan secara tepat untuk mewujudkan stabilisasi ekonomi, politik, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Ekspansi yang terus dilakukan oleh pengusaha ritel modern di setiap daerah mengharuskan bagi pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan yang memberikan aturan main berkenaan dengan pendirian ritel modern agar ke depan tidak menimbulkan polemik.

### **I.5.1 Konsep Kebijakan**

Menurut James E. Anderson dalam Winarno<sup>15</sup> menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan

---

<sup>15</sup> Winarno, B. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.

oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu: (1) titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat dalam sistem politik, (2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat, (3) kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah, (4) kebijakan dapat bersifat positif dan negatif, dan (5) kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi dan dituangkan secara formal dalam bentuk aturan atau ketentuan perundangan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat disusun menurut strata tertentu yang mengeluarkan kebijakan tersebut.

Mustopadidjaja memberikan suatu definisi kerja dari kebijakan. Menurutnya, kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran maupun organisasi pelaksanaan kebijakan, kemudian sebagai penerapan atau pelaksanaan dari organisasi pelaksana maupun kelompok atau sasaran yang dimaksud<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Mustopadidjaja, A.R. 1992. *Studi Kebijakan, Perkembangan, dan Penerapannya Dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LP FE UI, hlm 16

### 1.5.2 Kebijakan Publik

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah<sup>17</sup>. Menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijakan adalah:

1. Kebijakan publik selalu memiliki tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah
4. Kebijakan publik dapat berupa kebijakan yang positif dan negatif. Kebijakan positif menuntut pemerintah melakukan sesuatu sedangkan kebijakan negatif merupakan kebijakan untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah yang bersifat positif didasarkan atau dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Menurut Riant Nugroho, kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan, jadi jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

<sup>17</sup> Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, hlm. 19

Dalam penyusunan suatu kebijakan publik, terdapat beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh pembuat kebijakan. Willian N. Dunn menjelaskan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memakai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusah kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi kebijakan adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu

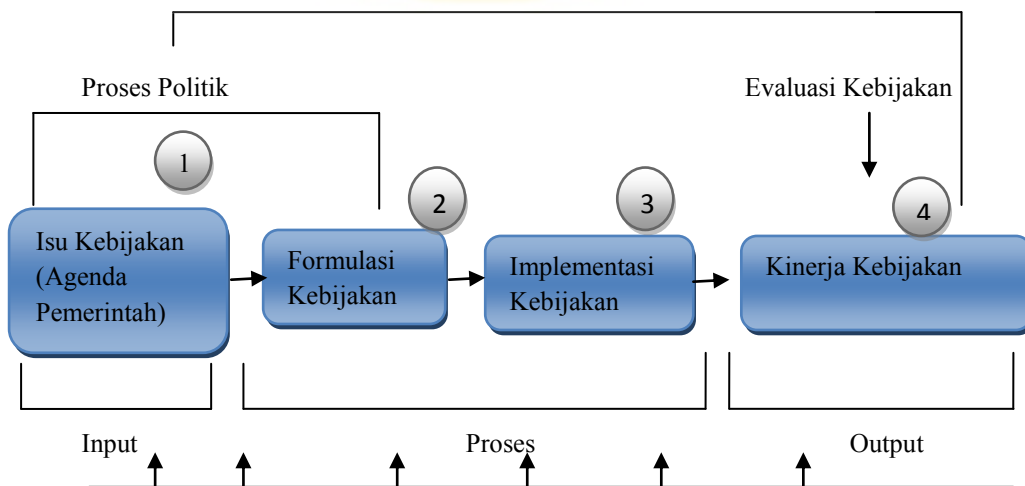


masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah, namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

#### 4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional yang artinya evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

**Gambar I.3**  
Proses Kebijakan



Dalam suatu kebijakan publik, tahap yang sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut adalah implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam poses kebijakan publik. Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh proses implementasi. Studi tentang implementasi muncul pada tahun 1970-an, para pakar kebijakan menyebutkan bahwa studi tentang kebijakan publik pada saat itu hanya menitik beratkan pada studi tentang pembuatan kebijakan dan studi tentang evaluasi tanpa memberi perhatian serius pada proses implementasi kebijakan itu sendiri. Hal tersebut sesuai fakta bahwa intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial dinilai tidak efektif pada masa itu.

Sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, implementasi sering bertentangan dengan yang diharapkan. Proses implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi peran pelaksana tingkat bawah atau *street level bureaucrats* untuk memberikan pelayanan atau mengatur kelompok sasaran (*target group*). Kompleksitas implementasi tidak hanya pada banyaknya aktor yang terlibat, tetapi juga karena proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang sifatnya individu maupun variabel yang sifatnya organisasional dan masing-masing variabel tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Dengan demikian, perlu mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi, tujuan dan kebutuhan para pelaksana termasuk kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Karena apa yang menjadi masalah dalam proses implementasi bisa tampak berbeda dari perspektif yang berbeda.

Menurut Sabatier dan Mazmanian menegaskan bahwa implementasi kebijakan berarti mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum. Bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan. Program-program inilah yang kemudian disusun struktur pengimplementasiannya agar selanjutnya menghasilkan perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh kebijakan yang dimaksud. Karena implementasi merupakan perwujudan nyata dari isi atau tujuan kebijakan publik, maka aktifitas-aktifitas implementasi haruslah dilakukan secara cermat. Bahwa memang ada kebijakan yang bersifat *self executed* yang dapat langsung dilaksanakan, tidaklah mengurangi makna penting dari kecermatan dalam menyusun proses implementasi, sebab dari hasil implementasi tersebut kinerja pemerintah dapat dinilai. Selain itu sebagai bagian proses kebijakan, maka dari hasil implementasi kebijakan memperoleh umpan balik, apakah perlu kebijakan direvisi atau tidak.

Menurut Hogwood dan Gunn secara umum ada tiga faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi. Pertama, karena kebijakan yang buruk (*bad policy*). Sejak awal perumus kebijakan tersebut dilakukan secara gegabah, tidak lengkap informasi yang diperlukan dalam perumusannya, salah memilih masalah, tujuan dan terget yang tidak jelas, dan sebagainya. Kedua, karena pelaksanaannya yang memang buruk (*bad execution*) yang terjadi akibat dari kurang koordinasi antar pelaksana, tidak cukup sarana dan prasarana penunjang, dsb. Ketiga, adanya faktor nasib yang tidak menguntungkan (*bad luck*) yang

terjadi akibat adanya hambatan-hambatan yang tidak dapat ditanggulangi dengan cara yang rasional sekalipun<sup>18</sup>.

### **I.5.3 Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008)<sup>19</sup>, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> Hogwood, Brian W., and Gunn, Lewis A. 1985. *Policy Analysis for the Real World*. New York: Oxford University Press, hlm 197

<sup>19</sup> Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita. 2008, hlm. 166

<sup>20</sup> Ibid

### I.5.3.1 Tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson dalam Winarno (2008)<sup>21</sup> membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

a. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe evaluasi kebijakan tersebut, penelitian kali ini menggunakan tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe tersebut dipilih karena peneliti ingin mengkaji sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Tentang Penataan

---

<sup>21</sup> Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita, hlm 229

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam mencapai tujuan yang ditetapkan serta mengukur dampak yang telah ditimbulkan kepada masyarakat.

### **I.5.3.2 Dimensi Evaluasi Kebijakan**

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno<sup>22</sup> setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat
- b. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan
- c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang
- d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik
- e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Sebagai aktivitas fungsional evaluasi kebijakan sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi dampak dari suatu kebijakan: 1) Evaluasi kebijakan berusaha untuk

<sup>22</sup> Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, edisi revisi. Yogyakarta: Media Pressindo, hlm 171-174

memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut. 2) Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan. 3) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Menurut Dunn<sup>23</sup>, evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai manfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator secara khusus dan pengguna lain secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Dampak kebijakan dalam hal ini melingkupi komponen sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta, hlm. 187

1. Kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengukur seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan kebijakan atau program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
2. Pelaksanaan kebijakan, yaitu untuk mengetahui apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar hal asasi warga. Selain itu untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini, evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dalam suatu implementasi kebijakan.

### **I.5.3.3 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Samudra dan kawan-kawan<sup>24</sup>, evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- a) Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.

<sup>24</sup> Nugroho, Riant. 2003. *KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm 186-187



- b) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c) Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d) Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Isu yang kritis dalam evaluasi dampak kebijakan adalah apakah suatu program telah menghasilkan efek yang lebih atau tidak yang terjadi secara alami meskipun tanpa intervensi atau dibandingkan dengan intervensi alternatif. Tujuan pokok penilaian dampak adalah untuk menafsirkan efek-efek yang menguntungkan atau hasil yang menguntungkan dari suatu intervensi. Rossi dan Freeman mendefinisikan penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal<sup>25</sup>.

#### **I.5.3.4 Indikator Evaluasi Kebijakan**

Berdasarkan tiga tipe evaluasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh James Anderson dalam Winarno (2008)<sup>26</sup>, tipe evaluasi kebijakan sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk

<sup>25</sup> Dunn, William N. 2000, terj. Samodra Wibawa, ed. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm 36.

<sup>26</sup> Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita, hlm 229

mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Sesuai dengan tipe tersebut maka tipe evaluasi kebijakan sistematis dalam penelitian kali ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Kebijakan mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan mengukur dampak yang muncul sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan Kebijakan yang menjadi indikator dalam penelitian mengenai Dampak Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Kediri terhadap Eksistensi Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Kota Kediri adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
2. Memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
3. Mengatur dan menata keberadaan pasar modern di daerah agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional yang telah ada yang mempunyai nilai historis dan menjadi asset daerah;
4. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan antara pasar tradisional dan pasar modern

berdasarkan prinsip perlindungan terhadap kelompok usaha, kecil dan menengah;

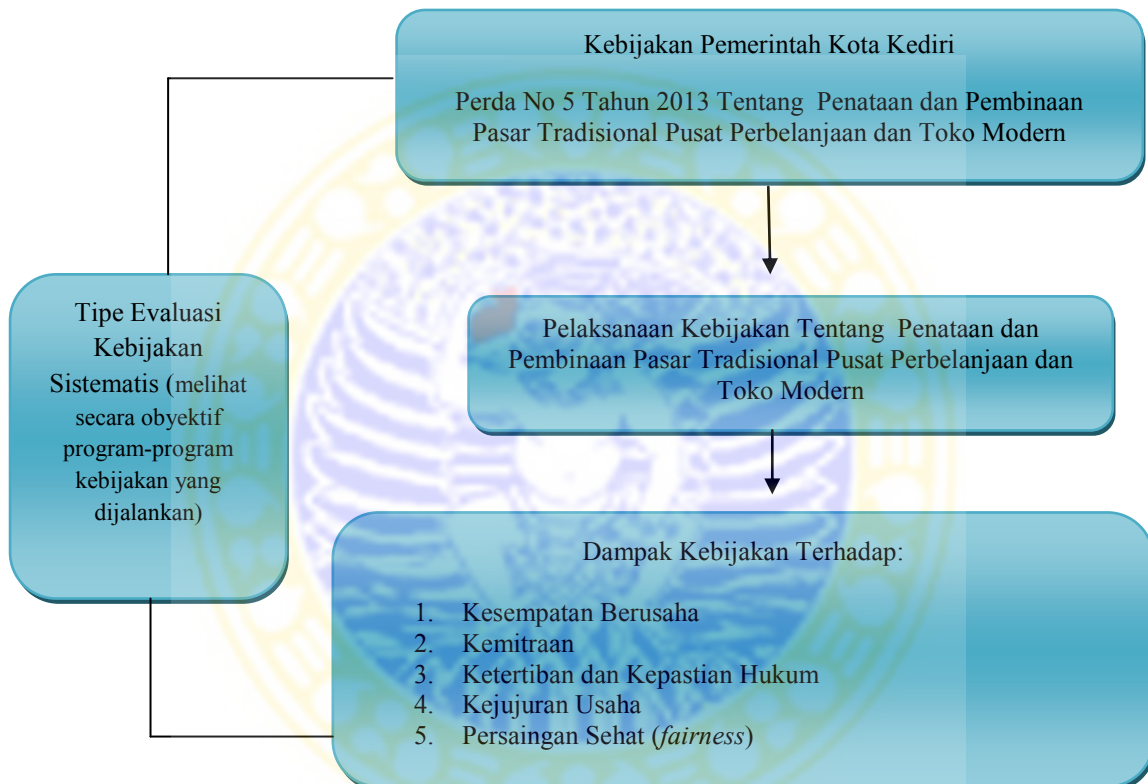
5. Mewujudkan sinergi yang saling memperkuat dan menguntungkan antara pasar modern dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional agar dapat tumbuh berkembang menuju tata niaga dan pola distribusi yang bersifat efisien dan berkelanjutan;
6. Menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan prinsip keserasian dan keselarasan dengan tata ruang wilayah.

#### **I.5.4 Kerangka Pemikiran**

Pemerintah Kota Kediri membuat kebijakan yang mengatur tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagai upaya melakukan perlindungan terhadap pasar tradisional dan menata keberadaan pasar modern serta mengupayakan untuk terjalinnya kemitraan antara pasar modern dengan pasar tradisional maupun dengan usaha kecil menengah, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Kediri. Adapun konsep evaluasi kebijakan mengacu pada pendapat James Anderson, bahwa tipe evaluasi kebijakan sistematis yaitu melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Berdasarkan tipe tersebut maka tujuan penataan dan pembinaan pasar tradisional,

pusat perbelanjaan dan toko modern adalah perlindungan pasar tradisional agar tercipta sinergi dalam pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan pola kemitraan antar pelaku usaha kecil dan pasar tradisional dengan pelaku usaha toko modern, terciptanya persaingan usaha yang sehat dengan prinsip keadilan (*fairness*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar I.4 Kerangka Pikir Penelitian

## I.6 Definisi Konsep

1. Evaluasi kebijakan adalah salah satu tahap dalam proses kebijakan yang menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.

2. Implementasi kebijakan merupakan upaya merealisasikan tujuan dari kebijakan publik dengan merumuskan program-program untuk membantu merealisasikan tujuan dari kebijakan publik.
3. Kebijakan Perda No 5 Tahun 2013 adalah kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Kediri sebagai langkah untuk memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional, koperasi, umkm serta membentuk suatu kemitraan antara para pengusaha ritel tradisional dengan ritel modern.
4. Dampak kebijakan adalah akibat dari adanya kebijakan publik terhadap kelompok sasaran dalam kebijakan tersebut.
5. Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar ketiga sektor perdagangan tersebut dapat berjalan beriringan tanpa mematikan usaha satu sama lain.
6. Pasar tradisional adalah tempat jual beli barang kebutuhan sehari-hari yang terdiri dari beberapa bangunan yang dikelola oleh pedagang.
7. Toko Modern merupakan tempat perbelanjaan dengan sistem pelayanan mandiri dengan konsep bangunan yang lebih modern.

### **I.7 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang terpenting dalam suatu penelitian karena sebagai panduan dalam melakukan suatu penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan

kegunaan tertentu.<sup>27</sup> Adanya metode penelitian dapat memberikan arahan terhadap penelitian tersebut secara sistematis dan teratur.

### **I.7.1 Tipe Penelitian**

Berdasarkan tujuan, penelitian yang dilakukan menggunakan tipe penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan dua atau lebih gejala atau variabel. Dengan tipe ini diharapkan dapat diketahui bagaimana korelasi antara dua atau lebih variabel baik pola, arah, sifat, bentuk maupun kekuatan hubungannya. Dalam penelitian kali ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2013 dengan program-program yang telah dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap pasar dan pedagang ritel tradisional serta mengukur dampak dari penerapan kebijakan tersebut.

Berdasarkan analisis data, penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya<sup>28</sup>. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui serta dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Metode penelitian kualitatif dapat memberi rincian secara kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode

<sup>27</sup> Prof. Dr. Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Hal 2.

<sup>28</sup> Strauss A., and Juliet Corbin. 2003, terj. M. Shodiq, ed. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 4.

kuantitatif<sup>29</sup>. Dalam penelitian kali ini, peneliti berusaha memberi penjelasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 5 Tahun 2013 serta dampak yang muncul setelah perda tersebut diberlakukan terhadap perkembangan pasar dan pedagang ritel tradisional di Kota Kediri. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan serta bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

### **I.7.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Kediri. Alasan peneliti memilih Kota Kediri sebagai lokasi penelitian karena Kota Kediri memiliki letak yang strategis yakni berada pada jalur transportasi regional yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Tulungagung, Nganjuk dan Malang serta menjadi kota yang mengalami perkembangan dari sektor perdagangan. Kota Kediri juga menjadi Kota Kediri memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan tersier yakni industri, perdagangan, pemerintahan dan pendidikan tinggi sehingga memungkinkan Kota Kediri sebagai sasaran investor asing maupun lokal untuk mendirikan ritel modern di Kota Kediri. Saat ini hampir di setiap kelurahan berdiri ritel modern berupa *minimarket* yang dianggap telah memberikan efek negatif terhadap pasar dan pedagang ritel tradisional yang ada wilayah berdirinya ritel modern tersebut. Sementara itu, peraturan daerah ini masih tergolong baru di Kota Kediri yang mulai berlaku dan

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm 5.

diundangkan pada tanggal 6 Mei 2013, sehingga memerlukan kajian mengenai isi dari kebijakan apakah sesuai dengan fenomena yang terjadi, bagaimana pelaksanaan peraturan daerah tersebut, sejauh mana peraturan tersebut mencapai tujuan dan sasaran serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan peraturan daerah tersebut terhadap pasar dan pedagang ritel tradisional di Kota Kediri.

### **I.7.3 Teknik Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian kali ini menggunakan metode *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan oleh peneliti dengan memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu<sup>30</sup>, dengan kata lain peneliti menemukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Dengan menggunakan *purposive sampling* diharapkan peneliti dapat menggali informasi kepada orang-orang yang memiliki kriteria dan dianggap paling tahu mengenai topik penelitian, sehingga kriteria sampel yang akan diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri No.5 Tahun 2013 serta dampak yang ditimbulkan. Informan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

#### 1. DPRD Kota Kediri

- Nama : Kholifi Yunun

---

<sup>30</sup> Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta., hlm 218.



- Jabatan : Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. PD. Pasar Joyoboyo Kota Kediri
- Nama : Saiful Yazin
  - Jabatan : Direktur Utama PD. Pasar Joyoboyo
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri
- Nama : Pipik
  - Jabatan : Kasi Kerjasama dan Produksi Dinas Perdagangan
4. BAPPEDA Kota Kediri
- Nama : Imam Setia Budi
  - Jabatan : Kepala Sub Bidang Perindagtamben, Koperasi dan Pariwisata
5. Badan Penanaman Modal Kota Kediri
- Nama : Eko
  - Jabatan : Kepala Sub Bidang Perizinan Badan Penanaman Modal
6. Pedagang di Pasar Tradisional
- Nama : Jannah (penjual sayuran)  
: Sulis (penjual ayam potong)  
: Susanti (penjual pakaian)
7. Pemilik Toko Kelontong
- Nama : Joko  
: Danang  
: Wahid

#### I.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam metode ilmiah serta memiliki hubungan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>31</sup>. Penelitian kali ini menggunakan metode wawancara mendalam. Proses wawancara menggunakan pedoman wawancara agar tetap berada pada fokus penelitian. Pemilihan metode tersebut dengan alasan bahwa peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai dampak pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri No.5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap pasar dan pedagang ritel tradisional serta ingin mengetahui sejauh mana kebijakan

---

<sup>31</sup> Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga., Hlm 96.

tersebut memberikan dampak kepada masyarakat setelah kebijakan tersebut diterapkan.

## 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Pemilihan metode tersebut karena dalam penelitian kali ini peneliti ingin memperjelas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri No.5 Tahun 13 dengan mencari informasi dari berbagai sumber.

### **I.7.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh<sup>32</sup>. Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Dalam triangulasi metode menjelaskan 2 strategi yang dilakukan oleh peneliti:

---

<sup>32</sup>Lexy J Moleong. 2011 *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Hlm 330.

1. Membandingkan keadaan dalam perspektif seseorang dengan pendapat dan pandangan orang lain.

Perlu untuk membandingkan pendapat dari berbagai dinas yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 5 Tahun 2013.

2. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen

Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada, dokumen tersebut dapat berupa data pasar tradisional dan pasar modern di Kota Kediri, peraturan, dsb.

#### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>33</sup>. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan

---

<sup>33</sup> Bogdan dan Biklen dalam Lexy J Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya., Hlm 248.

tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini dapat dilakukan melalui seleksi data yang ketat, pembuatan ringkasan, dan menggolongkan data menjadi suatu pola yang lebih luas dan mudah dipahami.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini menuntut untuk mampu mentransformasikan data kasar menjadi bentuk tulisan.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari seluruh konfigurasi kegiatan penelitian yang utuh dan dapat dilakukan selama penelitian berlangsung. Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti sudah mulai mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengolahan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data.

